

THE IMPORTANCE OF APPLYING ACCOUNTING TO THE ISTIQAMAH SIMAWANG ISLAMIC BOARDING SCHOOL

Sri Adella Fitri¹ Yuza Afina² Tari Durti³ Suci Putri Ayu⁴ Steffani Amelia⁵ Rahmad Dani⁶

UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
suciputriayu01@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk: 15 Juni 2023

Tgl. Diterima: 21 Juni 2023

Tersedia Online: 28 Juli 2023

Keywords:

Akuntansi, Pondok Pesantren,
Sektor Publik, Organisasi,
Keuangan

ABSTRAK/ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how accounting is applied at the Istiqomah Simawang Islamic Boarding School with reference to ISAK 35 which regulates the presentation of non-profit organization financial statements. Presentation of financial statements includes balance sheet and statement of comprehensive income, statement of changes in net assets, cash flow and notes to financial statements. Research at the Istiqomah Simawang Islamic boarding school shows that Islamic boarding schools use Islamic boarding school accounting guidelines in preparing financial reports.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan regulasi sektor publik terdiri dari beberapa bagian yang lebih spesifik, antara lain perkembangan regulasi terkait dengan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba membutuhkan dukungan untuk keberlanjutan organisasi tersebut. Sumber pendanaan nirlaba berasal dari pihak donatur seperti individu, masyarakat, kelompok, instansi, dan sebagainya. Salah satu contoh organisasi nirlaba adalah pondok pesantren. Akuntansi sektor publik pengklasifikasian, analisis serta dalam pembuatan laporan pengelolaan keuangan ini nantinya dapat digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan laporan keuangan bagi pihak yang membutuhkan untuk membantu pada saat pengambilan keputusan.

Akuntansi sektor publik merupakan suatu aktifitas yang memiliki tujuan yang lebih diarahkan untuk mencapai hasil tertentu yang memberikan manfaat bagi publik. Akuntansi sektor publik memiliki

itana yang sangat baik dengan perlakuan dan penerapan pada pengguna publik. Pengguna publik jangkauannya lebih luas dibandingkan dengan sektor swasta sebab kompleksnya terdapat pada lingkungan yang mempengaruhi lembaga publik. (Mardiasmo, 2018)

Kondisi akuntansi sektor publik saat ini di Indonesia tercermin dari peranan organisasi sektor publik seperti pemerintah dan usaha-usaha yang dilakukannya. Ini semua sudah menjadi tulang punggung dari perekonomian negara selama lebih dari 50 tahun. Apabila terjadi pembatasan pembahasan akuntansi pada pengelolaan sektor publik pada pemerintahan itu semua akan berdampak pada kosongnya pengaturan akuntansi sektor publik.

Organisasi nirlaba secara pengelolaan memiliki banyak persamaan dengan organisasi pada umumnya, sehingga sikap profesional harus dimiliki juga oleh pengelola organisasi nirlaba. Perubahan yang dialami organisasi nirlaba secara umum, termasuk perubahan generasi pemimpin organisasi, jumlah

tujuan akhir atau pengguna organisasi nirlaba, yang mungkin meningkat.

Pesantren tidak hanya mementingkan pendidikan, laporan kinerja atau laporan keuangan tentu bukan hal yang baru. Namun, untuk pesantren yang hanya melayani pendidikan, khususnya pesantren kecil di daerah terpencil, laporan tersebut tergolong baru dan dapat dicirikan sebagai ketidakpercayaan atau ketidakpercayaan terhadap bantuan yang diberikan. Menurut mereka, subsidi yang diberikan merupakan hak petani yang tidak terbatas dan tidak harus diumumkan.

Namun, dari perspektif pemerintah, laporan kinerja dan laporan keuangan sangat penting. Laporan keuangan telah terbukti memberikan informasi yang membantu para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan di sosial, baik pada politik maupun ekonomi sehingga dapat keputusan yang bersifat lebih baik maupun berkualitas.

Pesantren juga fokus pada pendidikan dan bisnis dapat disebut sebagai pesantren modern, sedangkan pesantren yang fokus pada pendidikan sering disebut sebagai pesantren salaf. Di antara dua jenis petani ini, pemerintah umumnya mendukung petani di seluruh Indonesia. Dengan ketentuan umum yang berlaku. Penulis tertarik dengan pondok pesantren salafi yang sebagian besar masih belum memiliki sistem informasi akuntansi sebagai dasar pengolahan keuangan.

Dalam hal pengelolaan keuangan, pesantren salafi biasanya tidak mengikuti prosedur baku tertulis, melainkan mengikuti tahap-tahap yang dilakukan secara turun-temurun. Meskipun beberapa menulis prosedur standar. Berdasarkan asas kepercayaan, dimana perusahaan yang mengelola ekonomi tani mendapat kepercayaan penuh dalam kegiatan operasionalnya. Berdasarkan asas kepercayaan, dimana perusahaan yang mengelola ekonomi tani mendapat kepercayaan penuh dalam kegiatan operasionalnya. (Suharni et al., 2019)

Pesantren merupakan lembaga sektor publik yang bertanggung jawab untuk melaporkan kepada khalayak umum. Akuntansi sektor publik berarti transparansi bagi publik dalam pelaksanaan Top of Form, hak untuk publik, dan pada sektor publik terkait dengan akuntansi ini juga sangat membutuhkan pengelolaan akuntansi yang jelas. Pada sektor publik merupakan kombinasi dari organisasi yang lebih terinci dan kompleks, dari pada lembaga lokal, negara hingga LSM dan entitas komersial. (Pituringasih et al., 2020)

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka penulis ingin mengetahui bagaimana pentingnya penerapan akuntansi pada Pondok Pesantren Istiqamah Simawang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan akuntansi pondok pesantren saat ini?
2. Bagaimana penerapan akuntansi pada Pondok Pesantren Istiqamah Simawang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan, adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan akuntansi pondok pesantren saat ini.
2. Mengetahui bagaimana penerapan akuntansi yang telah diterapkan oleh Pondok Pesantren Istiqamah Simawang.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi publik adalah kegiatan dengan maksud dimana tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang berguna bagi publik. Akuntansi sektor publik berkaitan erat dengan perlakuan dan penerapan pengguna publik. Pengguna publik memiliki jangkauan/koneksi yang lebih luas daripada sektor swasta karena entitas publik ini dipengaruhi oleh lingkungan yang kompleks.

Akuntansi sektor publik dirancang untuk dapat memberikan sikap terbuka kepada publik dalam melaksanakan hak untuk publik, dan pada sektor publik yang diidentifikasi pada akuntansi, juga mensyaratkan akuntansi tersebut. Sektor publik merupakan kombinasi organisasi otoritas negara dan lokal yang lebih kompleks serta organisasi non-pemerintah, maupun perusahaan milik negara dan lembaga pendidikan. (Hantono, 2021)

Akuntabilitas publik merupakan tugas yang diberikan kepada pihak yang diberikan tanggungjawab untuk melaporkan, memperlihatkan dan mengumumkan semua tindakan yang menjadi tanggungjawab pihak pemberi perikatan maupun atas tindakan yang dilakukan. Akuntansi sektor publik merupakan proses pengumpulan data, pengelompokan, analisis dan penyusunan laporan keuangan yang dikelola oleh lembaga publik agar nantinya lembaga publik dapat menggunakan laporan pengelolaan keuangan tersebut untuk dapat memberikan informasi pengelolaan laporan keuangan kepada pihak yang membutuhkan dan informasi ini sangat penting dalam membantupengambilan keputusan.

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi pada sektor publik mempunyai karakteristik yang cukup berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Dapat dilihat perbedaannya pada lembaga yang menggunakan ilmu akuntansi yang mana akuntansi sektor

publik banyak digunakan pada instansi pemerintah dan negara bagian dan kriteria akuntansi sektor publik ada dua hal yaitu:

1. Fokus pada jenis lembaga yang fokus pada jenis akuntansi khususnya pada organisasi nirlaba seperti instansi pemerintah.
2. Fokus pada tujuan kelembagaan, dengan sektor publik hanya fokus pada penyediaan layanan informasi kepada publik. (*Akuntansi Sektor Publik - Hantono, Lakharis Inuzula, Sri Apriyanti Husain, Anny Widiasmara, n.d.*)

Perkembangan regulasi di sektor publik terdiri dari beberapa bagian yang lebih spesifik diantaranya perkembangan regulasi terkait organisasi nirlaba. Nirlaba membutuhkan dukungan demi keberlangsungan organisasi tersebut. Sumber pendanaan nirlaba berasal dari pihak donatur seperti individu, masyarakat, kelompok, instansi, dan sebagainya. Akuntabilitas publik adalah kewajiban yang mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyatakan dan mengungkapkan kepada pihak yang diberi tanggungjawab atas semua tindakan maupun kegiatan yang dilakukan yang menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan proses penagihan, yang menimbulkan kepercayaan. (Ayu, 2022)

Akuntansi sektor publik untuk mengklasifikasikan, menganalisis dan menyiapkan laporan manajemen keuangan kemudian dapat digunakan untuk menginformasikan lembaga publik tentang laporan manajemen keuangan kepada mereka yang membutuhkannya, yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan.

Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang memiliki tujuan utama untuk mendukung sebab atau penyebab

dan meningkatkan kesadaran publik untuk tujuan nirlaba nonkomersial.

Organisasi nirlaba juga termasuk pada kategori rumah sakit, klinik umum, organisasi politik, organisasi sukarela, serikat pekerja, organisasi profesional, lembaga penelitian, museum, sekolah umum dan organisasi pemerintah. (Angelia & Rudy J. P, 2018)

Ciri-ciri organisasi nirlaba adalah sebagai berikut:

1. Kumpulan hibah dari sumber dan jumlah yang signifikan dari donor yang tidak mengharapkan imbalan.
2. Memiliki tujuan beroperasi untuk sosial bukan semata-mata hanya mencari keuntungan saja.
3. Pemberi dana hanya terfokus pada dana saja tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan terhadap organisasi. (Yenti & Fitri, 2014)

Perkembangan organisasi membutuhkan pengelolaan dan pengelolaan keuangan yang lebih bertanggungjawab dan akuntabel. Namun, tidak jarang banyak pesantren yang harus dikelola oleh orang-orang yang sudah menempuh pendidikan dibidangnya atau sudah dapat dikatakan layakagama, tetapi sedikit pengetahuan tentang manajemen keuangan dan akuntansi yang dimilikinya. Dipercayai bahwa kurangnya pengetahuan tentang keuangan dan akuntansi melemahkan kualitas pengambilan keputusan.

Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan diyakini membantu dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk manajemen internal dan pemangku kepentingan eksternal. Kegiatan akuntansi dipandang sebagai kegiatan yang tidak bertentangan dengan keyakinan agama dan juga menjadi tanggungjawab organisasi. Namun praktik akuntansi lembaga kurang berkembang dan tanggungjawab keuangan yang ditunjukkan oleh manajemen belum sesuai dengan harapan masyarakat. Laporan keuangan dipandang oleh manajemen

sebagai alat yang memegang peranan penting dalam peningkatan akuntabilitas organisasi. (Rodiah et al., 2020)

Organisasi Sektor Publik

Menurut Muindro, organisasi sektor publik bukan hanya sekedar organisasi yang mencari keuntungan. Oleh karena itu, kita dapat menginterpretasikan pengertian ini bahwa organisasi sektor publik itu sendiri adalah non-profit. Tujuan dari sektor publik adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum, sehingga para donatur organisasi pada sektor publik tidak berharap untuk menerima profit dari organisasi tersebut. Beberapa faktor dari lingkungan yang dapat mempengaruhi pada sektor publik, yaitu:

1. Faktor ekonomi yang mempengaruhi sektor publik contohnya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan per kapita, struktur produksi, tenaga kerja, aliran modal, cadangan devisa, teknologi, dll.
2. Faktor politik dikarenakan alasan politik meliputi hubungan negara dengan masyarakat, legitimasi pemerintah, ideologi negara, institusi, dll.
3. Faktor budaya pada sektor publik meliputi agama, suku, ras, budaya, bahasa, sejarah, sosiologi sosial dan pendidikan.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang menggambarkan dan menilai bagaimana jalannya suatu perusahaan, terutama oleh perusahaan yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di bursa efek. Informasi yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan dapat memungkinkan analisis neraca untuk mengevaluasi bagaimana kinerja perusahaan tersebut sehingga

informasi yang terdapat didalamnya dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. (Akuntansi Sektor Publik - Hantono, Lakharis Inuzula, Sri Apriyanti Husain, Anny Widiasmara, n.d.).

Sistem informasi akuntansi memiliki empat fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan data kejadian. Pengumpulan data insiden adalah tahap pengumpulan data dimana data disimpan sebagai dokumen sumber untuk digunakan nanti dan kemudian divalidasi atau divalidasi untuk memastikan akurasi data. Pengolahan data kemudian dapat dilakukan.
2. Sebagai langkah pengolahan data transaksi. Data peristiwa dapat digunakan sebagai informasi jika sebelumnya telah mengalami pengolahan data. Bergantung pada data apa yang dibutuhkan, itu dapat diproses dengan cara yang berbeda.
3. Sebagai pengelola data.
4. Untuk manajemen dan keamanan data.

Dengan adanya pesantren yang semakin dipercaya oleh masyarakat yaitu 28.194 pesantren yang terverifikasi pada tahun 2019, maka perlu penguatan tata kelola pesantren. Pengelolaan pesantren yang baik juga mencakup pengelolaan keuangan untuk keperluan pelaporan. Karena pondasi awal pondok pesantren adalah amanah maka banyak pondok pesantren yang memiliki catatan keuangan yang masih berupa penerimaan dan pembayaran dengan hanya laporan kas akhir. Dengan laporan sederhana ini, banyak informasi penting yang terlupakan, baik dari aset, kewajiban, kekayaan bersih sendiri, sehingga pesantren kurang berkembang secara optimal, dan hal-hal penting lainnya untuk menganalisis sumber laporan dan pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan belum adanya standar pelaporan keuangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan

laporan keuangan. Praktik akuntansi khususnya untuk lembaga keagamaan masih belum umum, namun dengan berkembangnya tata kelola yang baik yaitu organisasi yang mengarah pada tata kelola yang baik membutuhkan praktik akuntansi yang baik untuk meningkatkan kepercayaan publik. (Implementasi Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Pondok Pesantren)

ISAK 35

Pendapat Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) bahwa perbedaan utama antara korporasi nirlaba dan nirlaba terletak pada cara organisasi nirlaba dapat memperoleh sumber daya dari donator sebagai sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Atau mengharapkan manfaat ekonomi relatif terhadap jumlah sumber daya yang disediakan. Oleh karena itu, konsep pendaftaran, penilaian, penyajian dan penyajian barang sejenis lebih terkait dengan peraturan SAK atau SAK ETAP yang ada (Implementasi Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Pondok Pesantren)

Untuk menerapkan interpretasi ini, sebuah perusahaan, terlepas dari bentuk hukumnya, menggunakan kebijaksanaan nya sendiri untuk menentukan apakah itu sebuah perusahaan nirlaba. Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan komunitas: Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan entitas adalah:

1. Sumber daya pada organisasi nirlaba dapat berasal dari kontributor pada sumber daya yang tidak mengharapkan penggantian atau keuntungan moneter yang sepadan dengan jumlah sumber daya yang telah disediakan.
2. Barang dan jasa yang diproduksi jika tanpa laba dan diproduksi dengan laba maka untuk labanya tidak dibagikan.
3. Tidak ada kepemilikan sebagaimana harusnya badan

usaha nirlaba, dalam arti kepemilikan badan nirlaba tidak bisa dijual, dialihkan atau dibeli kembali, atau kepemilikan tidak dapat mencerminkan ketidaktertarikansumber daya perusahaan badan nirlaba sehubungan dengan likuidasi atau likuidasi perusahaan nirlaba. .

Pondok Pesantren

Pasal 1 Bab I UU Nomor 18 Tahun 2019: pesantren adalah lembaga berbasis masyarakat yang didirikan oleh perorangan, yayasan, dan organisasi masyarakat muslim serta orang-orang yang menyampaikan iman dan takwa kepada Allah SWT. Ajaran Islam Rahmatan Lil'alam yang mulia dan tegas tercermin dari sikapnya yang rendah hati, toleransi, dan juga keseimbangan, moderasi dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia lainnya yang terkandung melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Zaini, 2021)

Pondok pesantren merupakan lembaga keagamaan Islam dimana bertujuan untuk mendidik para santri agar memahami nilai-nilai agama Islam dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam. Di zaman sekarang ini dimana perkembangan teknologi berjalan sangat cepat, pendidikan agama sangat kurang diminati karena menurut sebagian orang, pendidikan agama sudah sangat kuno. Oleh karena itu, pesantren harus mampu bersaing sebagai lembaga pendidikan keagamaan dengan lembaga keagamaan yang sudah mapan, dan akhlak anak di era modern ini. (Rozaidin & Adinugraha, 2020)

Dari segi lembaga, Menteri Agama Republik Indonesia menuangkan dalam peraturan No. 3 Tahun 1979, jenis pesantren dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

1. Pesantren tipe A merupakan tempat santri belajar dan tinggal di

pesantren. Pesantren dengan pengajaran tradisional (sistem Wetona atau Soroga)

2. Pesantren tipe B yang menawarkan pendidikan klasikal dan pelatihan spiritual yang ditawarkan pada waktu tertentu dan santri tinggal di desa-desa kecil.
3. Pesantren tipe C merupakan asrama sementara bagi santri yang belajar di luar (madrasah atau sekolah umum lainnya), kyai hanya mengawasi dan membimbing santri.
4. Pesantren tipe D merupakan pesantren yang menyelenggarakan pesantrensekolah atau madrasah (Abdul Tolib, 2015)

Tidak terkecuali manajemen keuangan pesantren. Lembaga pendidikan sendiri memiliki kegiatan krusial di bidang keuangan, dimana pencatatan dan pelaporan keuangan mencerminkan keberlangsungan keuangan pondok pesantren. Oleh karena itu, departemen akuntansi bertindak sebagai manajer keuangan untuk mematuhi pedoman pelaporan keuangan Indonesia. Penyusunan standar akuntansi pesantren oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Bank Indonesia yang menetapkan standar akuntansi pondok pesantren. (Syukri et al., 2023)

Akuntansi Pondok Pesantren

Pesantren merupakan lembaga keagamaan yang harus memiliki sarana dan prasarana pendukung di lembaga tersebut. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa pesantren layak di bidang infrastruktur dan juga di bidang lain seperti administrasi dan organisasi kelembagaan. Aktivitas keuangan yang paling penting adalah sisi keuangan, dimana pengumpulan dan pelaporan keuangan mencerminkan kelayakan ekonomi pondok pesantren. Oleh karena itu akuntan mengelola perekonomian sesuai dengan standar akuntansi yang

ada. (Rozaidin & Adinugraha, 2020). Ikatan Akuntan Indonesia dan Bank Indonesia tahun 2018 berpendapat bahwa akuntansi pesantren adalah suatu proses yang menyusun laporan keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan, dengan memperhatikan karakteristik dan karakteristik pesantren adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pengelolaan keuangan pesantren harus diperkuat sehingga mampu menyusun laporan-laporan keuangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan standar akuntansi yang ada.
2. Tujuan penyusunan acuan pedoman akuntansi pesantren adalah akuntansi yang tidak mewajibkan pesantren menyusun laporan keuangan.
3. Pedoman akuntansi pesantren diidentifikasi dan diterapkan pada pesantren di Indonesia.
4. Pedoman akuntansi pesantren tidak diperuntukkan bagi perusahaan dan tidak berlaku bagi perusahaan yang berbadan hukum tersendiri, seperti perseroan terbatas milik pesantren. (Suherman, 2019)

Bank Indonesia (BI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengadopsi pedoman akuntansi pesantren yang memungkinkan pesantren menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, dengan menghormati sifat dan karakteristik syariah pesantren. Keuangan pada pesantren diterbitkan oleh SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. (Andarsari et al., 2022)

Menurut Shulton Mashud dan Khusnurdilo, anggaran dan pendanaan dari sumber mana saja, baik bersumber dari pemerintah maupun masyarakat, harus didasarkan pada asas umum yang

mengatur tentang keuangan sebagai berikut:

1. Ekonomis, tidak mewah, efisien dan secara teknis diperlukan.
2. Mengarahkan dan mengendalikan sesuai dengan rencana dan program/kegiatan.
3. Terbuka dan transparan terhadap lembaga keuangan dan untuk tujuan apapun dicatat serta dengan bukti penggunaannya.
4. Sebisa mungkin menggunakan kemampuan produksi dalam negeri. (Suharjono, 2019)

METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Pesantren Istiqamah Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dalam penelitian ini, materi yang diperoleh menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab satu arah atau tanya jawab satu arah yang sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara jenis ini lebih liberal daripada wawancara terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya penerapan akuntansi di Pesantren Istiqamah Simawang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Pondok Pesantren Istiqamah Simawang

Dengan pertumbuhan penduduk, sarana dan prasarana penunjang kehidupan juga perlu dilengkapi dan diperoleh secara tidak langsung. Terutama sarana pendidikan juga perlu dibangun, karena semakin banyak anak desa yang usia sekolahnya dan sebagian anak dari orang tua miskin/miskin.

Pesantren Istiqamah Simawang adalah sebuah pondok pesantren yang

terletak di Gadang Nagari Simawang, Jorong Pincura, Kecamatan Rbatan, Kabupaten Tanah Datar, yang diresmikan pada tanggal 15 Juli 1993. Dulunya merupakan gedung SMPN 2 Rembatan. Namun sejak SMPN 2 Rbatan mendapatkan lokasi baru dan kemudian dibangun sekolah, gedung tersebut tidak digunakan. Berdasarkan kesepakatan para tokoh masyarakat di pengurus Yayasan Pembangunan Simawang, tercapai kesepakatan untuk menggunakan gedung tersebut sebagai tempat pendidikan agama bagi anak-anak Nagari Simawang dengan nama Pesantren Istiqamah Simawang.

Sejak tanggal 15 Juli 1993 merupakan tahun berdirinya Pondok Pesantren Terpadu Istiqamah Simawang yang dipimpin oleh salah satu tokoh pendidikan Nagari Simawang yaitu Bapak Dt. Ali Mardius Di awal gedung ada total 53 siswa. Sementara itu, bagaimanapun, ada banyak siswa dari berbagai daerah. Seperti pesantren swasta lainnya, Pesantren Istiqamah Simawang dikelola oleh kepala sekolah yang berada di bawah pimpinan kepala sekolah dalam memimpin administrasi pesantren tersebut dengan dibantu oleh Kepala Tata Usaha beserta staf dan dosennya. Pengajar di Pesantren Istiqamah Simawang dan telah terlibat dalam kegiatan belajar mengajar selama ini.

Ketika pesantren didirikan, administrasi sudah memiliki program. Pesantren dapat terbagi menjadi dua bagian yaitu pertama adalah Salafiyah, Salafiyah adalah pesantren yang menitikberatkan pada bidang keagamaan tanpa bercampur dengan kurikulum madrasah, dan yang kedua adalah Khalafiyah yang mempelajari agama dan juga kurikulum madrasah yang digunakan, seperti pesantren terpadu. Istiqamah Simawang, program yang dikembangkan oleh pimpinan dan jajaran untuk mengubah pesantren menjadi pesantren terpadu, dengan memanfaatkan kurikulum madrasah namun tidak membatasi pelajaran agama. Perkembangan petani

ini semakin meningkat dan seiring dengan bertambahnya jumlah siswa.

Pesantren harus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pendidikan dan tren sosial selama fase modernisasi, yang membutuhkan pengenalan kebijakan strategis dan model manajemen baru. organisasi kelembagaan sektoral yang membagi tugas dan fungsinya ke dalam kategori-kategori.

Perkembangan Akuntansi Pada Pondok Pesantren Saat Ini

Pondok Pesantren Istiqamah juga perlu lebih diperhatikan laporan keuangannya, karena berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban. Karena akuntansi dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan para penyumbang dan donatur agar tidak disalahgunakan. Pembiayaan merupakan aspek yang sangat penting. Namun, masih banyak pesantren yang belum mengetahui tata cara pembukuan. Oleh karena itu pengelolaan keuangan pondok pesantren sering menghadapi masalah. Karena di pesantren ilmu akuntansi belum ada penyesuaian dengan pedoman akuntansi pesantren, dan pelatihan akuntansi pun sampai saat ini belum ada sosialisasinya. Penerapan dan penguatan akuntabilitas pesantren menjadi perhatian terkait dengan disahkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi pesantren, seperti UUD Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ketentuan ini memperkuat ikatan pesantren dan meningkatkan akuntabilitas kepada publik. (Rachmani, 2020)

Penerapan Akuntansi Pada Pondok Pesantren Istiqamah Simawang

Penerapan Akuntansi Pesantren di Pesantren Istiqamah Simawang. Ikatan Akuntan Indonesia telah mengembangkan format pelaporan pesantren sesuai ISAK 35, terdiri dari: (a) Neraca, (b) Laporan Laba Rugi Komprehensif, (c) Laporan Perubahan Aktiva Bersih, (d) Laporan Kas

Arus dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan pengamatan, wawancara dan wawasan penulis di Pondok Pesantren Istiqamah Simawang, Pesantren melaporkan pedoman akuntansi, dalam menyusun laporan keuangan pesantren. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada laporan keuangan pesantren dan mengacu pada pedoman akuntansi pesantren, pesantren membuat entri akuntansi, mulai dari analisis transaksi, entri, entri dalam akuntansi, kemudian penyusunan laporan keuangan. dan hanya kemudian. masuk ke aplikasi akuntansi pesantren.

1. Laporan Kegiatan

Laporan kegiatan berisi aktiva bersih tak terbatas, aktiva bersih terikat sementara, dan aktiva bersih permanen. Salah satu contoh kekayaan bersih yang tidak dibatasi di Pondok Pesantren Istiqamah Simawang berasal dari sumbangan orang tua santri, hibah pemerintah dan swasta, pendiri dan pengurus yayasan serta wali nagari. Biaya tidak terikat terdiri dari biaya pendidikan, biaya umum dan administrasi.

2. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai aktiva lancar dan tidak lancar, kewajiban dan aktiva bersih. Hasil penerapan dalam laporan keadaan keuangan Pondok Pesantren Istiqamah Simawang untuk aktiva tetap yang dimiliki telah dicatat dan sesuai dengan pembukuan Pesantren.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran dana selama periode tertentu, yang dikelompokkan berdasarkan

aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kesimpulan penulis bahwa di pesantren, untuk mencatat arus kas, penerimaan dan penarikan uang dicatat sesuai dengan pembukuan pesantren.

4. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan memuat pernyataan mengenai kesesuaian antara laporan keuangan pesantren dengan kebijakan akuntansi pesantren dalam menyusun catatan atas laporan keuangan yang merangkum aspek-aspek material penting yang berkaitan dengan operasionalisasi syariah.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada pondok pesantren, penerapan akuntansi di Islamic internet istiqamah simawang sudah baik. Diimplementasikan sesuai dengan ketentuan ISAK 35. Penerapan akuntansi di pesantren dapat dikatakan baik, karena mencatat pendapatan, biaya operasional dan biaya lainnya. Bagian akuntansi Pesantren Istiqamah Simawang mampu memberikan informasi keuangan konsistensi akuntansi pesantren dan penerapannya konsisten antara standar akuntansi yang berlaku dengan penerapan akuntansi pesantren yang baik.

Sumber yang mendukung keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan adalah bagian keuangan, karena sektor keuangan memberikan dukungan untuk pengelolaan pendidikan (Wahidin,2016). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik dan transparan diperlukan agar kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan keuangan juga diketahui oleh pemangku kepentingan lainnya. Demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan, maka keterbukaan dan tranparansi harus

dilaksanakan dalam bentuk pelaporan keuangan yang terstandar. Selain itu, ini memberi donasi saat yang aman ketika mereka merasa donasi mereka telah ditangani di akhir formulir. (Sahri, 2021)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang berlangsung, peneliti menyimpulkan bahwa Pondok Pesantren Istiqamah menyusun laporan keuangan yang memuat pendapatan dan pengeluaran pondok pesantren. Pondok Pesantren Istiqamah mencatat aset dalam laporan keuangan dan mencatat penyusutan aset dalam laporan keuangan. Laporan keuangan pesantren didasarkan pada standar akuntansi pesantren. Penerapan akuntansi di pondok pesantren dilakukan dengan aplikasi khusus untuk pencatatan keuangan pesantren yang diawasi oleh pemerintah.

IMPLIKASI DANKETERBATASAN

Penerapan akuntansi pada pondok pesantren perlu ditingkatkan lagi, agar dalam mengelola keuangannya bisa lebih baik. Laporan keuangan agar lebih diperhatikan lagi karena berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban, karena akuntansi dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan para penyumbang dan donator agar tidak disalahgunakan.

Diharapkan dengan melakukan penerapan akuntansi pada pondok pesantren dalam membuat pelaporan keuangannya maka akan mempermudah dalam membuat laporan keuangan lebih benar dan cepat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi peneliti lain bahwa penerapan akuntansi pada pondok pesantren dapat memberikan informasi serta sumber jawaban untuk segala urusan yang berhubungan dengan

keuangan, serta dapat memuat atau menyajikan laporan keuangan yang akurat, tepat dan dapat menjalankan aktivitas secara efektif. Dalam penelitian ini pengumpulan data hanya berdasarkan hasil wawancara sehingga proses penelitian kurang objektif.

REFERENCES

- Abdul Tolib. (2015). Pendidikan di Pesantren Modern. *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(1), 60–66.
- Akuntansi Sektor Publik - Hantono, Lakharis Inuzula, Sri Apriyanti Husain, Anny Widiasmara. (n.d.).
- Andarsari, P. R., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Keuangan, L., & Pesantren, P. (2022). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK-ETAP PADA ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK-ETAP PADA Ponpes DHUAFA AL-IKHLAS. *e-Journal of Economic Appreciation*, 10(September), 357–366.
- Angelia, N., & Rudy J.P. (2018). Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No.45 tentang Lembaga Sosial Tresna Werdha Hana. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 1–8.
- Ayu, R.D. (2022). akuntansi sektor publik (Hery panda).
- Hantono, I.L. et al. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (Syaiful Ba). Alfabet.
- Implementasi Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Pesantren. (n.d.). *Majalah Neraca*, 2.
- Mardiasmo. (2018). akuntansi sektor publik (Mardiasmo).
- Pituringasih, E., Herwanti, R.T., & Handajani, L. (2020). *Penyuluhan dan Pendampingan*

- Mempersiapkan Pengelolaan Keuangan Panti Asuhan Mertak Paok "Darus – Shiddiqien NW", Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Gema Ngabdi*, 2(3).
- Rachmani, FA (2020). C. NCAF: Prosiding Konferensi Nasional Akuntansi dan Keuangan, 2(2018), 39–46.
- Rodiah, S., Satria, W., Putri, A.A., Azmi, Z., Suci, R.G., Marlina, E., & Azhari, I.P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Pantai Raja Kampar. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 133–138.
<https://doi.org/10.54951/comsep.v1i1.32>
- Rozaidin, M., & Adinugraha, H.H. (2020). Aplikasi Akuntansi Pesantren (Studi Pada Koperasi Pesantren Al Hasyimi Kabupaten Pekalongan). *EKONOMI SYARIAH: Jurnal Studi Ekonomi*, 4(2), 123.
- Sahri, Y. (2021). Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren Menggunakan PSAK No.45. *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2).
<https://doi.org/10.34308/eqien.v8i2.256>
- Suharjono. (2019). Pengelolaan Keuangan Pesantren. *Jurnal Kesetimbangan*, 8(2), 49–62.
- Suharni, S., Ratih, S., & Sari, K. (2019). EKOMAKS: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi; Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Pesantren di Kota Madiun. 8 (September), 53–63.
- Suherman, L.P. (2019). Analisis Pentingnya Akuntansi Pesantren Bagi Pesantren Al-Matuq Sukabumi. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(2), 65–70.
<https://doi.org/10.18196/jati.020220>
- Syukri, M., Fitri, S.M., & Syafhariawan, H. (2023). Analisis Pelaporan Keuangan Pesantren Al-Muthmainnah Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren. *Jurnal Ekonomi*, 2(1), 1175–1183.
- Yenti, E., & Fitri, S.A. (2014). Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan BalanceScorecard Pada STAIN SEKOLAH DASAR ISLAM (STAIN) BATUSANGKAR Oleh: Elfina Yenti*, Sri Adella Fitri*. *Juris*, 13(2), 184–204.
- Zaini, A. (2021). UU Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Tuban. 15(18), 64–77